



RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2025

**KOTA TARAKAN
TAHUN 2024**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan mengumpulkan data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan OPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan *review* hasil evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan

kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan mengacu pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan pada akhirnya Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
19. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Penataan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
20. Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026;
21. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 100.3.3.3/HK-II/146/2024 Tahun 2024 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2025 ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 dan perkiraan capaian pelaksanaan Renja Tahun 2024 yang selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2025 adalah :

- Sebagai bagian tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah;
- Untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Renja ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025;
- Sebagai pedoman penyusunan pelaksanaan program / kegiatan Dinas PUPR Kota Tarakan pada Tahun 2025; dan
- Sebagai pengukur secara kualitatif dan kuantitatif capaian kinerja Dinas PUPR Kota Tarakan dalam kurun waktu satu (1) tahun serta capaian kinerja tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TARAKAN

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan, analisis kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan, review terhadap rancangan awal RKPD Tahun

2025 serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TARAKAN

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, indikator kinerja, tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TARAKAN

Bab ini memuat rencana kerja dan pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2025.

BAB V PENUTUP

BAB II HASIL EVALUASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024-2025 dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota prakiraan capaiannya hingga tahun 2024 adalah sebesar 100%. Program ini ditunjang oleh beberapa kegiatan, diantaranya adalah sebagai berikut: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Disamping itu, untuk mendukung tujuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu :

- Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur perkotaan, dapat dicapai dengan sasaran sebagai berikut: Meningkatnya pelayanan air bersih, dengan indikator persentase rumah tangga yang dapat mengakses air minum. Sasaran tersebut dapat terlaksana dengan ditunjang oleh Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). Prakiraan capaian dari kedua program tersebut pada tahun 2024 adalah sebesar 99,59%. Pada akhir tahun 2023, capaian indikator ini telah mencapai 98,77%.
- Meningkatnya sarana dan prasarana perkotaan, dengan indikator sasaran diantaranya:
 1. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik. Sasaran tersebut dapat terlaksana dengan ditunjang oleh Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan prakiraan capaian

74,22% pada tahun 2024. Pada akhir tahun 2023, capaian indikator ini adalah sebesar 74,12%.

2. Persentase penambahan bangunan pemerintah dan fasilitas umum dengan prakiraan capaian pada tahun 2024 adalah sebesar 100%. Sementara pada akhir tahun 2023, capaian indikator ini adalah sebesar 257,58%. Hal ini disebabkan adanya kebijakan pokok pikiran dewan di tahun 2023. Sasaran ini ditunjang oleh Program Penataan Bangunan Gedung yang mana pada tahun 2023 ini diberikan anggaran sebesar Rp 102.621.275.754,00.
 3. Persentase bangunan dan lingkungan yang tertata. Sasaran tersebut dapat terlaksana dengan ditunjang oleh Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya. Prakiraan capaian pada tahun 2024 untuk indikator sasaran ini adalah sebesar 0%. Sementara pada akhir tahun 2023, capaian indikator ini adalah sebesar 100%.
 4. Persentase panjang jalan dengan kondisi mantap ditunjang oleh Program Penyelenggaraan Jalan. Prakiraan capaian pada tahun 2024 untuk indikator sasaran ini adalah sebesar 71,82%. Sementara pada akhir tahun 2023, capaian indikator ini adalah sebesar 69,57%. Angka tersebut mengalami peningkatan nilai persentase jika dibandingkan dengan target di Renstra pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan kegiatan pada saat pembuatan APBD murni 2024.
 5. Persentase pembinaan jasa konstruksi dengan prakiraan capaian tahun 2024 adalah sebesar 100%. Sementara capaian realisasi pada akhir tahun 2023 adalah sebesar 85,00%.
 6. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan prakiraan capaian tahun 2024 adalah sebesar 98,35%. Sepanjang tahun 2023, indikator sasaran ini 90,55%.
- Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana persampahan, dengan indikator sasarannya adalah persentase

TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun. Prakiraan capaian indikator sasaran tersebut pada tahun 2024 adalah sebesar 100,00%. Sementara pada tahun 2023 capaiannya adalah sebesar 88,24%.

- Meningkatnya pengendalian banjir, dengan indikator sasarannya adalah persentase luas genangan banjir. Prakiraan capaian indikator sasaran tersebut pada tahun 2024 adalah sebesar 0,108%. Sementara pada tahun 2023, luas genangan banjir telah berhasil mencapai 0,1104 %. Tingginya nilai capaian pada tahun 2023 untuk penanganan banjir salah satunya disebabkan oleh adanya bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan adanya kebijakan pokok pikiran dewan (Pokir) serta dana RT.

Faktor-faktor penyebab tercapainya program/kegiatan diatas adalah dikarenakan beberapa hal, diantaranya adalah adanya bantuan dana alokasi khusus (DAK) maupun dana bantuan keuangan (Bankeu). Beberapa penyebab keberhasilan pencapaian realisasi program/kegiatan tersebut diantaranya adalah:

- Kecepatan dan ketepatan dalam mengatasi dan memecahkan masalah di lapangan terkait pelaksanaan pekerjaan dan masalah sosial.
- Pelaksanaan dan pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) infrastruktur sanitasi yang tertib dan terkoordinasi.
- Adanya pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, ketersediaan material yang selalu tersedia, dan mudahnya akses ke lokasi.
- Permasalahan dampak sosial terhadap masyarakat yang relatif kecil dan cepat teratasi.
- Adanya sumber dana pendukung dari APBD Kota Tarakan Tahun 2023 yang selaras dengan pencapaian target kegiatan.
- Adanya kerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Utara maupun Balai Jasa Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pada tahun 2023, hampir seluruh program/kegiatan terealisasi dengan persentase capaian diatas 100%. Selanjutnya, hasil *review* tersebut dituangkan dalam tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang s/d Tahun 2024 Kota Tarakan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi s/d tahun	Target dan Realisasi Kinerja			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Kinerja	Realisasi	2023				Realisasi	Tingkat Capaian Target Renstra (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Volume tampungan air baku (meter3)	1,160,590 m3	1,033,090 m3	1,033,090 m3	1,032,590 m3	99.95%	1,160,590 m3	1,032,590 m3	88.97%
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Volume tampungan embung dan penampung lainnya dan Unit air baku	1,160,590 m3	1,033,090 m3	1,033,090 m3	1,032,590 m3	99.95%	1,160,590 m3	1,032,590 m3	88.97%
1.03.02.2.01.0113	Pembangunan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun (KM)		1,778 m	2,442 m	1,679 m	68.76%	0.32 km	0.85 km	
1.03.02.2.01.0114	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi (Unit)						1 Unit	1 Unit	
1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit)		1,023,090 m3	0 Unit	0 Unit		1 Unit	0 Unit	
1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)		5 Dokumen				2 Dok	2 Dok	

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan	9 Dokumen	1 Dokumen						0.00%
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Air Minum (%)	95.96%	92.08%	95,62%	98.77%		99.59%	99.59%	103.79%
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan layanan pemasangan jaringan distribusi Air Minum	95.96%	92.08%	95,62%	98.77%		95,62%	99.59%	103.79%
1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipa di Kawasan Perkotaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipa(SR)		8,915 SR	2,500 SR	5,802 SR	232.08%	1,200 SR	15,917 SR	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Luas Genangan Banjir (%)	0.096%	0.116%	0.110%	0.1104%	100.36%	0.108%	0.096%	100.00%
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Luas Genangan Yang Tertangani (Ha)	21.67 Ha	10.04 Ha	1.55 Ha	1.45 Ha	93.55%	3.60 Ha	0.70 Ha	3.23%
1.03.06.2.01.0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Lingkungan)		26,089 m	15,649 m	2,200 m	14.06%	5 Sistem	5 Sistem	

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun (Dokumen)						1 Dok	1 Dok	
1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)		54,062 m	18,500 m	10,289 m	55.62%	5 Sistem	5 Sistem	
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun	100.00%	70.59%	88.24%	88.24%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun	9 Unit	4 Unit	3 Unit	3 Unit	100.00%	2 Unit	9 Unit	100.00%
1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun (Ton/hari)		450 RT	78,594 RT	79,993 RT	101.78%	144 Ton/Hari	152 Ton/Hari	
1.03.04.2.01.0011	Pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan(Orang)						2 Orang		
1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen)						1 Dok	2 Dok	

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.03.04.2.01.0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi (Unit)						3 Unit	3 Unit	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	73.11%	74.14%	75.06%	74.12%	98.74%	75.06%	74.22%	101.52%
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	46,383 KK	58,294 KK	58,996 KK	58,996 KK	100.00%	58,419 KK	60,456 KK	130.34%
1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (M ³ /Hari)		8 Unit	1 Unit	1 Unit	100.00%	22 Unit	22 m3/hari	
1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)						1 Unit	1 Unit	
1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)						2 Dok	1 Dok	

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum	100.00%	110.61%	242.42%	257.58%	106.25%	100.00%	100.00%	100.00%
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung dan Fasilitas Umum yang Terbangun dan Terpelihara	8 Unit	75 Unit	74 Unit	84 Unit	113.51%	8 Unit	286 Unit	3575.00%
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)		71 Unit	45 Unit	55 Unit	122.22%	5 Unit	130 Unit	
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)			37 Dok	40 Dok	108.11%	3 Dok	178 Dok	

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)		315 Dok	500 Dok	216 Dok	43.20%	500 Dok	1031 Dok	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata	100.00%	59.01%	75.00%	100.00%	133.33%	100.00%	100.00%	100.00%
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	100.00%	59.01%	75.00%	100.00%	133.33%	100.00%	100.00%	100.00%
1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata(Kawasan)			1 Kaw	1 Kaw	100.00%	1 Kaw	1 Kaw	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap	65.94%	67.98%	69.50%	69.57%	100.10%	71.51%	71.82%	108.92%
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Yang Terbangun	237,358 m	234,766 m	237,765 m	237,565 m	99.92%	241,150 m	238,440 m	100.46%
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap	167,066 m	15,671 m	161,628 m	162,000 m	100.23%	166,306 m	167,023 m	99.97%
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Jembatan Yang Terbangun	84 Unit	85 Unit	87 Unit	90 Unit	103.45%	88 Unit	88 Unit	104.76%
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Jembatan Dengan Kondisi Mantap	51 Unit	53 Unit	53 Unit	53 Unit	100.00%	56 Unit	32 Unit	62.75%

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)		3 Dok	28 Dok	2 Dok	7.14%	1 Dok	6 Dok	
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun (KM)		0.22 km	3.01 km	1.85 km	61.46%	3.31 km	2.67 km	
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)		7.19 km	8.68 km	8.68 km	100.00%	6.52 km	38.03 km	
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)		1.95 km	6.08 km	3.50 km	57.54%	1.38 km	9.49 km	
1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi (Jembatan)		2 Unit				1 Unit	9 Unit	
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)		2 Dok	1 Dok	0 Dok	0.00%	233.558 km	232.56 km	
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)			0.60 km	0.10 km	16.67%	0.30 km	1.60 km	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pembinaan jasa konstruksi	20%	22.79%	80.00%	85.00%	106.25%	100.00%	100.00%	500.00%
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga jasa konstruksi yang terlatih	150 Orang							0.00%

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya layanan informasi jasa konstruksi	90%							0.00%
1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Persentase jasa konstruksi yang mendapat izin	20%							0.00%
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pengawasan izin usaha jasa konstruksi yang terlaksana	4 Izin	2 Keg	1 Keg	1 Keg	100.00%	1 Keg	4 Keg	100.00%
1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)		2 Lap	1 Lap	1 Lap	100.00%	300 Usaha	30 Usaha	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	98.35%	89.54%	93.94%	90.55%	96.39%	98.35%	98.35%	100.00%
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RTRW dan RDTR yang Ditetapkan	2 Dokumen	4 Dok	1 Dok	1 Dok	100.00%	1 Dok	6 Dok	300.00%
1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)		1 Dok	1 Dok	1 Dok	100.00%	1 Dok	3 Dok	

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi (Orang)						1 Dok	100 Orang	
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rakor Yang Dilaksanakan	9 Koordinasi	6 Keg	3 Keg	3 Keg	100.00%	3 Keg	12 Keg	133.33%
1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)		6 Dok	3 Dok	3 Dok	100.00%	3 Dok	10 Dok	
1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Dokumen)						1 Dok	1 Dok	
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang	90.00%		65.00%	65.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)			2 Dok	2 Dok	100.00%	6 Dok	8 Dok	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	100.00%	100.00%	96.73%	96.73%	100.00%	100.00%	100.00%

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	12 Dokumen	3 Dok		1 Dok		3 Dok	7 Dok	58.33%
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		2 Lap				2 Lap	4 Lap	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		1 Lap				1 Lap	2 Lap	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100.00%	100.00%	96.73%	96.73%	100.00%	100.00%	100.00%
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		158 Org/Bln	80 Org/Bln	74 Org/Bln	92.50%	80 Org/Bln	306 Org/Bln	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		32 Dok	12 Dok	20 Dok	166.67%	12 Dok	64 Dok	
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Kepegawaian	100%		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)			82 Orang	82 Orang	100.00%	20 Orang	102 Orang	

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang terlaksana	100%	100.00%	100.00%	98.62%	98.62%	100.00%	100.00%	100.00%
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		14 Paket	4 Paket	4 Paket	100.00%	5 Paket	23 Paket	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 Paket	2 Paket	2 Paket	100.00%	7 Paket	11 Paket	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		37 Paket	53 Paket	48 Paket	90.57%	45 Paket	130 Paket	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		3 Paket	5 Paket	3 Paket	60.00%	6 Paket	12 Paket	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2 Lap	10 Lap	10 Lap	100.00%	20 Lap	32 Lap	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase aset/BMD yang diadakan	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)						2 Unit	2 Unit	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		12 Unit	12 Unit	17 Unit	141.67%	12 Unit	41 Unit	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang yang tersedia	100%	100.00%	100.00%	91.76%	91.76%	100.00%	100.00%	100.00%

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		300 Lembar	1 Lap	200 Lembar		1 Lap	1 Lap	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		24 Lap	12 Lap	9 Lap	75.00%	12 Lap	45 Lap	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset/BMD yang dipelihara	100%	100.00%	100.00%	94.87%	94.87%	100.00%	100.00%	100.00%
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		24 Unit	2 Unit	2 Unit	100.00%	2 Unit	28 Unit	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		39 Unit	26 Unit	20 Unit	76.92%	26 Unit	85 Unit	
X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya		1 Unit	1 Unit	1 Unit	100.00%	1 Unit	3 Unit	
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		25 Unit	12 Unit	29 Unit	241.67%	12 Unit	66 Unit	
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		68 Unit	41 Unit	25 Unit	60.98%	41 Unit	134 Unit	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja yang dibutuhkan dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut. Disamping itu, analisis kinerja pelayanan ini dilakukan guna mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan. Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan dapat dilihat pada pencapaian indikator-indikator kinerja dan variabelnya yang telah ditetapkan. Adapun indikator yang berkaitan dengan kinerja pelayanan meliputi :

- Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- Indikator Kinerja Kunci (IKK)
- *Sustainable Development Goal's* (SDG's)

Indikator-indikator kinerja ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Disamping itu, kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga dapat disandingkan terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020. Pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Nilai SAKIP			75.00 BB	75.00 BB	75.00 BB	79.82 BB	81.85 A	82.35 A	82,85/A	
2	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Mutu Pelaksanaan Kegiatan Lab Uji Bahan Konstruksi Sesuai Standar SNI			100%	100%	100%	100.00%	98.77%	100%		
3	Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Air Minum	√		92.34%	95.62%	95.96%	92.89%	98.77%	99.59%	96.33%	
4	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	√		72.87%	72.99%	73.11%	74.17%	74.12%	74.22%	76.08%	
5	Persentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum			72.73%	87.88%	100.00%	113.64%	257.58%	100.00%		
6	Persentase Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata			59%	83%	100%	62.34%	100.00%	100%	15.63%	
7	Persentase panjang jalan dengan kondisi mantap			64.14%	65.63%	65.94%	67.38%	69.57%	71.82%	72.66%	
8	Persentase pembinaan jasa konstruksi			20.00%	20.00%	20.00%	24.28%	85.00%	100.00%		
9	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang			89.54%	93.94%	98.35%	89.54%	90.55%	98.35%	98.35%	
10	Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun			76.47%	88.24%	100.00%	70.59%	88.24%	100.00%	40.00%	
11	Persentase luas genangan banjir			0.12%	0.11%	0.096%	0.116%	0.110%	0.096%		
12	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota		√	78.34	79.29	79.29	77.33	78.47	78.47	81.19	
13	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh		√	89.79	89.79	89.79	76.25	76.25	76.25	76.25	

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota										
14	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		√	Surat Pernyataan	Surat Pernyataan	Surat Pernyataan	Surat Pernyataan	Surat Pernyataan	Surat Pernyataan	Surat Pernyataan	
15	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)	√	√	95.62	95.96	95.96	92.89	98.77	99.59	96.33	
16	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	√	√	72.99	73.11	73.11	74.17	74.12	74.22	76.08	
17	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota (%)		√	77.43	77.43	77.43	100	100	100.00		
18	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)		√	65.63	65.94	65.94	67.38	69.57	71.82	72.66	
19	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (%)		√	20	20	20	24.28	39.76	39.76	42.86	
20	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi (%)		√	100.00	100.00	100.00	100.00	99.38	99.38	100.00	

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan diuraikan sebagai berikut:

3.1. Koordinasi dan Sinergi Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan selalu berkoordinasi dengan empat kecamatan di Kota Tarakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) kecamatan maupun musrenbang kota untuk mengakomodir usulan-usulan pembangunan. Selain bersinergi terkait program dan kegiatan, pada tingkat kota juga dilaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk usulan bantuan keuangan provinsi dan usulan dana alokasi khusus (DAK) infrastruktur.

3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Beberapa indikator sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengalami perubahan dan pergeseran ke Perangkat Daerah lain. Adapula indikator yang berubah tolok ukur, seperti :

- a. Program Penyelenggaraan Jalan pada tahun 2019-2020 adalah panjang jalan dalam kondisi baik, sementara sejak tahun 2021 hingga saat ini berubah menjadi panjang jalan dengan kondisi mantap. Kondisi mantap merupakan gabungan antara jalan dengan kondisi baik dan sedang. Hal ini menyebabkan adanya penurunan target.

- b. Ketersediaan air bersih masih relatif kurang.
- c. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penyelenggaraan penataan ruang menyebabkan beberapa pemanfaatan ruang tidak berperan sebagaimana fungsinya. Masih banyak bangunan yang berada pada kawasan sempadan jalan, sempadan sungai maupun sempadan pantai.
- d. Permasalahan banjir juga belum tertangani secara optimal dikarenakan perubahan tata guna lahan di kawasan daerah aliran sungai (DAS) mengakibatkan berkurangnya fungsi resapan air, erosi dan sedimentasi.

3.3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional, SPM dan SDGs.

Visi : “Terwujudnya Tarakan Sebagai Kota Maju dan Sejahtera Melalui Smart City”

Misi : Misi ke-3 “Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur public yang cepat, mudah, murah, dan adil”

Misi ke-5 “Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, kreativitas dan inovatif berdasarkan ilmu pengetahuan”

3.4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan.

Tantangan :

- a. Mewujudkan infrastruktur perkotaan modern;
- b. Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dasar guna menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari belum maksimal;

- c. Tidak seimbangnya ketersediaan anggaran dengan mobilitas penduduk yang tinggi berakibat terhadap pelayanan masyarakat;
- d. Penggunaan Teknologi Informasi dalam aktivitas perkantoran;
- e. Anggaran peningkatan kapasitas aparatur yang masih terbatas.

Peluang :

- a. Secara geografis Kota Tarakan masuk wilayah strategis, dengan berdekatan dengan Malaysia;
- b. Kebutuhan dasar dibidang air bersih bagi masyarakat Kota Tarakan yang selalu meningkat;
- c. Kota Tarakan sebagai pintu gerbang bagi wilayah Kalimantan bagian Utara, dengan teknologi, sumber daya alam dan sumber daya manusia guna terwujudnya kota maju dan sejahtera.

3.5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Berdasarkan pertimbangan permasalahan diatas maka isu-isu strategis perangkat daerah sebagai berikut :

- a. Pembangunan jalan lingkar Tarakan menjadi jalan strategis nasional (JSN) guna percepatan pembangunan ekonomi dan wisata.
- b. Peningkatan infrastruktur jalan eksisting untuk mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah dan akses menuju obyek wisata pantai Amal.
- c. Pembangunan jembatan Bulungan-Tarakan.
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan darat dan jembatan.
- e. Meningkatkan koordinasi kelembagaan penyelenggaraan jalan antara penyelenggaraan jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

- f. Pengurangan luasan wilayah banjir.
- g. Pembangunan tanggul pengaman pantai untuk melindungi aset pemerintah dan masyarakat.
- h. Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM).
- i. Peningkatan kualitas layanan air minum untuk masyarakat.
- j. Mempertahankan dan meningkatkan ruang terbuka hijau.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviu terhadap Rencana Kerja (Renja) Murni Tahun 2025 dilakukan dengan mengkomparasi antara Renja Murni Tahun 2024 dan hasil analisis kebutuhan perubahan. Perubahan beberapa indikator pada Renja Murni Tahun 2025 dan Hasil analisis kebutuhan Tahun 2025 diantaranya adalah pada sub kegiatan berikut ini:

- Penambahan sub kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah yang sebelumnya tidak ada.
- Penambahan sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu yang sebelumnya tidak ada. Penambahan sub kegiatan ini dimaksudkan untuk dapat memberikan fasilitas terhadap tamu yang datang ke kantor.
- Penambahan sub kegiatan Pengadaan Alat Besar karena akan ada pengadaan 2 unit alat besar untuk menunjang kegiatan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan.

Perbedaan target pada Renja Tahun 2025 dan Hasil Analisis Kebutuhan diantaranya adalah sebagai berikut:

- Perencanaan, Peganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, semula 3 laporan menjadi 8 laporan.
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, targetnya semula 49 unit menjadi 94 unit.
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, targetnya semula 41,86% menjadi 42,86%.

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

- Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, targetnya semula 9 Bangunan Gedung menjadi 11 Bangunan Gedung.
- Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota, targetnya semula 21,88% menjadi 15,63%.
- Program Penyelenggaraan Jalan, targetnya semula 72,66% menjadi 62,77%.

Review lengkap terhadap Rencana Awal dan Analisis Kebutuhan Renja 2025 tersaji pada tabel 2.3 berikut ini :

TABEL 2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025 KOTA TARAKAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rancangan Awal Tahun 2025		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Analisis Kebutuhan			
			Target	Rp (dalam ribu rupiah)		Target	Rp (dalam ribu rupiah)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
				179.837.793			277.454.865		
Meningkatnya Pemenuhan Tata Kelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Nilai SAKIP	82,85 /A	Nilai	14.870.948	Nilai SAKIP	82,85 /A	Nilai	14.980.456
Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Nilai SAKIP	82,85 /A	Nilai	14.870.948	Nilai SAKIP	82,85 /A	Nilai	14.980.456
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Layanan Bagian Kesekretariatan	80	%	14.870.948	Indeks Layanan Bagian Kesekretariatan	80	%	14.980.456
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	3	Laporan		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	8	Laporan	9.000
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	0	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	2.000
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	0	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	2.000
1.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Data	5.000

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan sesuai SAP	12 Dokumen	10.889.925	Jumlah dokumen administrasi keuangan sesuai SAP	12 Dokumen	11.023.896
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan	10.002.945	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan	10.136.917
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	886.979	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	886.979
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rasio peningkatan kompetensi ASN	56,00 %	200.000	Rasio peningkatan kompetensi ASN	56,00 %	200.000
1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	200.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	200.000
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	247.195	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	255.123
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5.000
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	58 Paket	110.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	58 Paket	111.928
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	75050 Paket	32.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	32.000
1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	6.000

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	100.195	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	100.195
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terinput dalam aplikasi SIMDA Barang dan E-MD	49 Unit	2.060.556	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terinput dalam aplikasi SIMDA Barang dan E-MD	94 Unit	2.013.464
1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	1.711.314	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	264.222
1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar				Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	2 Unit	1.400.000
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13 Unit	64.286	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13 Unit	64.286
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	100.000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45 Unit	100.000
1.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	33 Unit	184.956	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	33 Unit	184.956
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase layanan jasa penunjang yang tersedia	100 %	202.000	Persentase layanan jasa penunjang yang tersedia	100 %	202.000
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	200.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	200.000
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	41,86 %	1.271.273	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	42,86 %	1.276.973
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	5.700
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	745.896	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	745.896
1.03.01.2.09.0003	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	75.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	75.000
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	407.097	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	407.097
1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	64 Unit	43.280	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	64 Unit	43.280

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Perkotaan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	84 Nilai		Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	84 Nilai	
Meningkatkan akses air minum layak bagi masyarakat		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan	96,33 %	5.300.000	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan	96,33 %	5.300.000
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Volume tampungan air baku (meter3)	1.032 m3 .590	18.675.000	Volume tampungan air baku (meter3)	1.032 m3 .590	18.675.000
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Volume tampungan embung dan penampung lainnya dan Unit air baku	1.032 m3 .590	18.275.000	Volume tampungan embung dan penampung lainnya dan Unit air baku	1.032 m3 .590	18.275.000
1.03.02.2.01.0114	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi		
1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun		
1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	0 Unit	17.875.000	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	0 Unit	17.875.000
1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	2 Dokumen	400.000	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	2 Dokumen	400.000

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan	2 Dokumen	400.000	Jumlah dokumen perencanaan	2 Dokumen	400.000
1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	2 Dokumen	400.000	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	2 Dokumen	400.000
1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum	96,33 %	5.300.000	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum	96,33 %	5.300.000
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan layanan pemasangan jaringan distribusi Air Minum	96,33 %	5.300.000	Persentase cakupan layanan pemasangan jaringan distribusi Air Minum	96,33 %	5.300.000
1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	1 Unit	500.000	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	1 Unit	500.000
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	2 Dokumen	300.000	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	2 Dokumen	300.000
1.03.03.2.01.0032	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1000 SR	4.500.000	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1000 SR	4.500.000

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan		Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPA yang terbangun	40 %	2.500.000	Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPA yang terbangun	40 %	2.500.000
1.03.04	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPA	40 %	2.500.000	Persentase Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPA	40 %	2.500.000
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun	2 Unit	2.500.000	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun	2 Unit	2.500.000
1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	152,4 2 Ton/hari	2.300.000	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	152,4 2 Ton/hari	2.300.000
1.03.04.2.01.0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	1 Unit	200.000	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	1 Unit	200.000
Meningkatnya akses sanitasi layak bagi masyarakat		Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi	76,08 %	3.100.000	Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi	76,08 %	3.100.000
1.03.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	76,08 %	3.100.000	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	76,08 %	3.100.000
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	6085 5 Rumah Tangga	3.100.000	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	6085 5 Rumah Tangga	3.100.000
1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	50 Rumah Tangga	0	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	50 Rumah Tangga	0

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	500 Rumah Tangga	3.000.000	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	500 Rumah Tangga	3.000.000
1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	100.000	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	100.000
Meningkatnya pengendalian banjir		Persentase luas genangan banjir	81,19 %	29.250.000	Persentase luas genangan banjir	81,19 %	70.423.928
1.03.06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	60,38 %	29.250.000	Persentase drainase dalam kondisi baik	60,38 %	70.423.928
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Luas Genangan Yang Tertangani (Ha)	2,56 Ha	29.250.000	Luas Genangan Yang Tertangani (Ha)	2,56 Ha	70.423.928
1.03.06.2.01.0020	Optimalisasi Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	3000 m	5.500.000	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	8385 m	16.770.000
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	4 Sistem Drainase Perkotaan	19.500.000	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	4 Sistem Drainase Perkotaan	40.903.928
1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	24 Sistem Drainase Perkotaan	3.500.000	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	24 Sistem Drainase Perkotaan	12.000.000

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	2 Dokumen	750.000	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	2 Dokumen	750.000
Meningkatnya bangunan gedung yang memenuhi standar teknis			52,94 %	41.470.000	Persentase Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung yang memenuhi standar teknis	57,89 %	48.970.000
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Peresentase Bangunan Gedung yang terbangun dan terpelihara	52,94 %	41.470.000	Peresentase Bangunan Gedung yang terbangun dan terpelihara	57,89 %	48.970.000
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung dan Fasilitas Umum yang Terbangun dan Terpelihara	9 Bangunan Gedung	41.470.000	Jumlah Bangunan Gedung dan Fasilitas Umum yang Terbangun dan Terpelihara	11 Bangunan Gedung	48.970.000
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	4 Bangunan Gedung	800.000	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	4 Bangunan Gedung	800.000
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	40.000.000	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	7 Dokumen	47.500.000

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	500 Dokumen	670.000	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	500 Dokumen	670.000
Meningkatnya bangunan gedung yang memenuhi standar teknis			21,88 %	6.873.450	Persentase Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata	15,63 %	7.873.450
1.03.09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase bangunan dan lingkungan yang tertata sesuai dengan rencana tata bangunan dan lingkungannya	21,88 %	6.873.450	Persentase bangunan dan lingkungan yang tertata sesuai dengan rencana tata bangunan dan lingkungannya	15,63 %	7.873.450
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	21,88 %	6.873.450	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	15,63 %	7.873.450
1.03.09.2.01.0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	150 Dokumen	173.450	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	150 Dokumen	173.450
1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	1 Kawasan	6.100.000	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	1 Kawasan	5.100.000

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	7 Dokumen	600.000	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	7 Dokumen	2.600.000
Meningkatnya kondisi jalan mantap			72,66 %	54.948.395	Persentase panjang jalan dengan kondisi mantap	62,77 %	102.782.032
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan	72,66 %	54.948.395	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan	62,77 %	102.782.032
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Yang Terbangun	242,3 9 km	54.948.395	Panjang Jalan Yang Terbangun	243,3 8 km	102.782.032
1.03.10.2.01		Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap	168,9 76 km		Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap	145,9 7 km	
1.03.10.2.01		Jumlah Jembatan Yang Terbangun	89 jembatan		Jumlah Jembatan Yang Terbangun	89 jembatan	
1.03.10.2.01		Jumlah Jembatan Dengan Kondisi Mantap	59 jembatan		Jumlah Jembatan Dengan Kondisi Mantap	59 jembatan	
1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan	Terkelolanya Leger Jalan	1 Dokumen	500.000	Terkelolanya Leger Jalan	1 Dokumen	400.000
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun		
1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	1 Jembatan	2.600.000	Jumlah Jembatan yang Diganti	Jembatan	0
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	1,24 Km	7.460.000	Panjang Jalan yang Dibangun	2,23 Km	8.653.395

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	4,35 Km	16.788.395	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	5,95 Km	73.303.841
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	6,38 Km	12.750.000	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	3,31 Km	10.254.796
1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	1 Jembatan	1.500.000	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	0 Jembatan	0
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	1 Jembatan	10.000.000	Jumlah Jembatan yang Dibangun	1 Jembatan	7.500.000
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	232,558 Km	350.000	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	232,558 Km	270.000
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1,50 Km	3.000.000	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1,00 Km	2.400.000
Meningkatnya kualitas jasa konstruksi		Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	42,86 %	700.000	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	42,86 %	700.000
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100% %	700.000	Persentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100% %	700.000
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga jasa konstruksi yang terlatih yang tersertifikasi	90 Orang	450.000	Jumlah tenaga jasa konstruksi yang terlatih yang tersertifikasi	90 Orang	450.000
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi kulaifikasi Jabatan Operator dan Teknis atau Analis	Jumlah tenaga jasa konstruksi kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi yang difasilitasi sertifikasi	90 Orang	200.000	Jumlah tenaga jasa konstruksi kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi yang difasilitasi sertifikasi	90 Orang	200.000

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	30 Lembaga	150.000	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	60 Lembaga	150.000
1.03.11.2.01.0012	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	5 Orang	50.000	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	5 Orang	50.000
1.03.11.2.01.0015	Penyediaan SOP Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	1 Dokumen	50.000	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	1 Dokumen	50.000
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	0 Orang	0	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	0 Orang	0
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1 Dokumen	150.000	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1 Dokumen	150.000
1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah perangkat pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1 Perangkat	50.000	Jumlah perangkat pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1 Perangkat	50.000
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kota	1 Dokumen	50.000	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kota	1 Dokumen	50.000

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.03.11.2.02.0014	Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Terselenggaranya pelatihan untuk peningkatan kapasitas administrasi SIPJAKI	3 Orang	50.000	Terselenggaranya pelatihan untuk peningkatan kapasitas administrasi SIPJAKI	0 Orang	0
1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang dioperasikan	0	0	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang dioperasikan	1 Layanan Informasi	50.000
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Pengawasan Pemanfaatan produk jasa konstruksi yang terlaksana	30 Produk Jakon	100.000	Jumlah Pengawasan Pemanfaatan produk jasa konstruksi yang terlaksana	30 Produk Jakon	100.000
1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah paket pekerjaan Jasa Konstruksi kota yang diawasi dan dievaluasi tertib penyelenggaraan	30 Paket Pekerjaan	50.000	Jumlah paket pekerjaan Jasa Konstruksi kota yang diawasi dan dievaluasi tertib penyelenggaraan	30 Paket Pekerjaan	50.000
1.03.11.2.02.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi kota yang diawasi dan dievaluasi tertib penyelenggaraan			Jumlah Bangunan Konstruksi kota yang diawasi dan dievaluasi tertib penyelenggaraan		
1.03.11.2.02.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi kota yang diawasi dan dievaluasi tertib penyelenggaraan	0	0	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi kota yang diawasi dan dievaluasi tertib penyelenggaraan	0	0
1.03.11.2.02.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi kota yang diawasi dan dievaluasi tertib penyelenggaraan	0	0	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi kota yang diawasi dan dievaluasi tertib penyelenggaraan	0	0

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.03.11.2.02.0008	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 Dokumen	50.000	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 Dokumen	50.000
Meningkatnya pembangunan yang sesuai tata ruang		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	98,35 %	2.150.000	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	98,35 %	2.150.000
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kepatuhan Pelaksanaan KKPR	25 %	2.150.000	Persentase Kepatuhan Pelaksanaan KKPR	25 %	2.150.000
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RTRW dan RDTR yang Ditetapkan	3 Dokumen	1.350.000	Jumlah Dokumen RTRW dan RDTR yang Ditetapkan	1 Dokumen	1.350.000
1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	450.000	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	2 Dokumen	450.000
1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	350.000	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	350.000
1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	400.000	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	400.000
1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	2 Laporan	150.000	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	2 Laporan	150.000

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rakor Yang Dilaksanakan	3 Dokumen	450.000	Jumlah Rakor Yang Dilaksanakan	3 Dokumen	450.000
1.03.12.2.03.0005	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	3 Dokumen	200.000	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	3 Dokumen	200.000
1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	250.000	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	250.000
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang	85 %	350.000	Persentase Penyelesaian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang	85 %	350.000
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	3 Dokumen	100.000	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	3 Dokumen	100.000
1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	250.000	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	250.000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses perencanaan terdapat Program dan Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, terdapat beberapa usulan program dan kegiatan yang terkait dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah.

Berdasarkan hasil usulan program dan kegiatan masyarakat, terdapat 147 total usulan yang terverifikasi oleh tim TAPD untuk Kota Tarakan dengan Pagu terverifikasi sebesar Rp 7.560.000.000,00. Apabila dirinci per kecamatan, di Kecamatan Tarakan Barat terdapat 42 usulan dengan nilai pagu sebesar Rp 2.310.000.000,00. Kecamatan Tarakan Tengah terdapat 50 usulan dengan nilai pagu sebesar Rp 2.500.000.000,00. Kecamatan Tarakan Timur terdapat 37 usulan dengan nilai pagu sebesar Rp 1.850.000.000,00, dan Kecamatan Tarakan Utara terdapat 18 usulan dengan nilai pagu sebesar Rp 900.000.000,00.

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

**TABEL 2.4 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2025 KOTA TARAKAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TARAKAN**

Kecamatan/ Kelurahan/ Sub Kegiatan	Belum Terverifikasi TAPD		Prioritas 1 Renja		Total Jumlah Usulan	Total Pagu Anggaran (dalam Ribu Rupiah)
	Jumlah Usulan	Pagu Anggaran (dalam Ribu Rupiah)	Jumlah Usulan	Pagu Anggaran (dalam Ribu Rupiah)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tarakan Barat	103	16,529,000	42	2,310,000	145	18,839,000
Karang Anyar	35	4,950,000	19	950,000	54	5,900,000
Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	32	1,700,000	19	950,000	51	2,650,000
Rehabilitasi Jembatan	1	50,000			1	50,000
Rekonstruksi Jalan	2	3,200,000			2	3,200,000
Karang Anyar Pantai	27	6,279,000	9	700,000	36	6,979,000
Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	22	2,650,000	8	550,000	30	3,200,000
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan			1	150,000	1	150,000
Rehabilitasi Jembatan	1	100,000			1	100,000
Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	2	2,029,000			2	2,029,000
Rekonstruksi Jalan	2	1,500,000			2	1,500,000
Karang Balik	6	550,000	6	260,000	12	810,000
Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	6	550,000	6	260,000	12	810,000
Karang Harapan	31	4,500,000	3	150,000	34	4,650,000
Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	29	4,100,000	3	150,000	32	4,250,000
Rehabilitasi Jembatan	1	100,000			1	100,000
Rekonstruksi Jalan	1	300,000			1	300,000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Karang Rejo	4	250,000	5	250,000	9	500,000
Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	4	250,000	5	250,000	9	500,000

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tarakan Tengah	68	5,300,000	50	2,500,000	118	7,800,000
Kampung I Skip	16	800,000	8	400,000	24	1,200,000
Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	16	800,000	8	400,000	24	1,200,000
Pamusian	23	1,150,000	13	650,000	36	1,800,000
Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	23	1,150,000	13	650,000	36	1,800,000
Sebengkok	17	850,000	15	750,000	32	1,600,000
Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	17	850,000	15	750,000	32	1,600,000
Selumit	8	400,000	10	500,000	18	900,000
Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	8	400,000	10	500,000	18	900,000
Selumit Pantai	4	2,100,000	4	200,000	8	2,300,000
Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	2	100,000	4	200,000	6	300,000
Pemeliharaan Berkala Jalan	2	2,000,000			2	2,000,000
Tarakan Timur	65	7,400,000	37	1,850,000	102	9,250,000
Gunung Lingkas	9	450,000	7	350,000	16	800,000
Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	9	450,000	7	350,000	16	800,000
Kampung Empat	12	600,000	4	200,000	16	800,000
Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	11	550,000	4	200,000	15	750,000
Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1	50,000			1	50,000
Kampung Enam	10	500,000	8	400,000	18	900,000
Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	10	500,000	8	400,000	18	900,000
Lingkas Ujung	4	200,000	4	200,000	8	400,000
Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	4	200,000	4	200,000	8	400,000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mamburungan	16	4,750,000	5	250,000	21	5,000,000
Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	7	350,000	5	250,000	12	600,000
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	7	3,850,000			7	3,850,000

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	1	350,000			1	350,000
Rekonstruksi Jalan	1	200,000			1	200,000
Mamburungan Timur	9	450,000	7	350,000	16	800,000
Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	6	300,000	6	300,000	12	600,000
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	3	150,000	1	50,000	4	200,000
Pantai Amal	5	450,000	2	100,000	7	550,000
Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	5	450,000	2	100,000	7	550,000
Tarakan Utara	48	9,805,000	18	900,000	66	10,705,000
Juata Kerikil	26	8,705,000	2	100,000	28	8,805,000
Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	23	3,305,000	2	100,000	25	3,405,000
Rehabilitasi Jembatan	1	200,000			1	200,000
Rekonstruksi Jalan	2	5,200,000			2	5,200,000
Juata Laut	11	550,000	2	100,000	13	650,000
Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	9	450,000	2	100,000	11	550,000
Rehabilitasi Jembatan	1	50,000			1	50,000
Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	1	50,000			1	50,000
Juata Permai	11	550,000	14	700,000	25	1,250,000
Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	11	550,000	14	700,000	25	1,250,000
Grand Total	284	39,034,000	147	7,560,000	431	46,594,000

TABEL 2.5 HASIL VERIFIKASI USULAN POKOK PIKIRAN DEWAN

Anggota Dewan	Tarakan Barat		Tarakan Tengah		Tarakan Timur		Tarakan Utara		Total Jumlah Usulan	Total Pagu Usulan (dalam Ribu Rupiah)
	Jumlah Usulan	Pagu Usulan (dalam Ribu Rupiah)	Jumlah Usulan	Pagu Usulan (dalam Ribu Rupiah)	Jumlah Usulan	Pagu Usulan (dalam Ribu Rupiah)	Jumlah Usulan	Pagu Usulan (dalam Ribu Rupiah)		
Abdul Kadir, ST.			14	1,600,000					14	1,600,000
Akbar Mahmud Ola,S.E	10	500,000	1	50,000					11	550,000
Al Rhazali, S.IP	2	150,000							2	150,000
Dapot Sinaga	22	2,450,000	1	200,000					23	2,650,000
Deno Rante Danun							3	450,000	3	450,000
Dino Andrian	10	1,350,000			2	300,000	1	200,000	13	1,850,000
H. Anas Nurdin, S.H.,M.H					11	1,200,000			11	1,200,000
H. Hamka, S.E	4	600,000							4	600,000
H. Muhammad Yusuf,S.E					2	400,000			2	400,000
H.Andi Muslim Petta Wata, S.E	2	150,000							2	150,000
H.M Rusli H. Jabba					2	150,000			2	150,000
Hayzal Zulkhan Helmi,S.H			1	100,000			11	950,000	12	1,050,000
Hj. Sriwati			1	100,000					1	100,000
Ibnu							19	2,100,000	19	2,100,000
Idoeliansyah Sabran			6	900,000					6	900,000

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

Anggota Dewan	Tarakan Barat		Tarakan Tengah		Tarakan Timur		Tarakan Utara		Total Jumlah Usulan	Total Pagu Usulan (dalam Ribu Rupiah)
	Jumlah Usulan	Pagu Usulan (dalam Ribu Rupiah)	Jumlah Usulan	Pagu Usulan (dalam Ribu Rupiah)	Jumlah Usulan	Pagu Usulan (dalam Ribu Rupiah)	Jumlah Usulan	Pagu Usulan (dalam Ribu Rupiah)		
Maslan Abdul Latif			1	200,000					1	200,000
Mellyana Anggraeni, S.Pi			1	100,000	8	500,000			9	600,000
Muhammad Hanafia					8	1,050,000			8	1,050,000
Muhammad Rais	6	550,000	1	100,000					7	650,000
Muhammad Yunus, S.H			2	200,000					2	200,000
Muhammad Yusuf Ramadinata, S.E., M.H	3	900,000							3	900,000
Mustain, S.H							2	300,000	2	300,000
Saipullah			3	860,000					3	860,000
Simon Patino, SAB			2	100,000	2	200,000			4	300,000
Sofyan Udin Hianggio, S.E			5	1,000,000	2	400,000			7	1,400,000
Sukir					21	1,100,000			21	1,100,000
Yulius Dinandus, S.T., M.H			4	450,000	2	200,000			6	650,000
Grand Total	59	6,650,000	43	5,960,000	60	5,500,000	36	4,000,000	198	22,110,000

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan adalah amanat UU No.17/2007 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Prioritas Nasional berdasarkan Perpres tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan mensinkronisasikan Prioritas Nasional dengan mengalokasikan sebesar Rp 277.454.865.107,00 sebagai berikut :

- Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik terdapat dalam :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp 14.980.456.000,00.

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, terdapat dalam
 - Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan pagu sebesar Rp 18.675.000.000,00.
 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembangunan Kanal Banjir
 - Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
 - Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya.
 - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan pagu sebesar Rp 3.100.000.000,00.
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
 - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase dengan pagu sebesar Rp 70.423.927.567,00.
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan
 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan

- Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
- Program Penyelenggaraan Jalan dengan pagu sebesar Rp 102,782,031,540.00.
 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
 - Pembangunan Jalan
 - Rekonstruksi Jalan
 - Pemeliharaan Berkala Jalan
 - Rehabilitasi Jembatan
 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan
 - Pemeliharaan Rutin Jalan
- Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, terdapat dalam
 - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan pagu sebesar Rp 5.300.000.000,00.
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.
 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan.
- Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, terdapat dalam
 - Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional dengan pagu sebesar Rp 2.500.000.000,00.
 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
 - Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan.

- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan.
- Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS.
- Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, terdapat dalam :
 - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan pagu sebesar Rp 2.150.000.000,00.
 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota.
 - Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang.
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang.
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.
 - Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang.
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.
 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang.
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2025 merupakan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2025 - 2026 telah menetapkan tujuan yaitu :

“Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Perkotaan”

Penyediaan infrastuktur yang memadai merupakan hak warga masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Infrastuktur merupakan faktor penunjang bagi aktifitas sehari-hari masyarakat dalam suatu wilayah, pembangunan infrastruktur tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Pembangunan adalah proses pembangunan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Untuk mencapai keberlanjutan yang menyeluruh, diperlukan keterpaduan antara 3 pilar pembangunan, yaitu keberlanjutan dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tiga pilar utama tersebut yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan saling berintegrasi dan saling memperkuat satu dengan yang lain. Untuk itu tiga aspek tersebut harus diintegrasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar tercapai pembangunan berkelanjutan yang selain dapat menjaga lingkungan hidup/ekologi dari kehancuran atau penurunan kualitas, juga dapat menjaga keadilan sosial dengan tidak mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi.

Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

Sasaran akan menjadi pedoman dalam penyusunan kegiatan, alokasi sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka perlu menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya tata kelola DPUPR
2. Meningkatnya pelayanan air bersih
3. Meningkatnya sarana dan prasarana perkotaan
4. Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana persampahan

5. Meningkatnya pengendalian banjir.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tarakan Tahun 2025

NO.	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	TARGET CAPAIAN KINERJA TUJUAN/SASARAN	
		Tahun 2023	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	Nilai SAKIP	81.85/A	82,85/A	83,15/A
2	Nilai SAKIP	81.85/A	82,85/A	83,15/A
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	80,02%	84	85
4	Persentase penduduk yang memiliki akses air minum layak bagi masyarakat	98,77%	96,33%	97,29%
5	Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengelolaan limbah domestik	74,12%	76,08%	76,70%
6	Persentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum	86,54%	52,94%	100,00%
7	Persentase Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata	100%	52,94%	100%
8	Persentase panjang jalan dengan kondisi mantap	69,57%	72,66%	73,36%
9	Persentase pembinaan jasa konstruksi	85%	42,86%	100%
10	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	90,55%	98,35%	98,50%
11	Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun	88,24%	100%	100%
12	Persentase luas genangan banjir	0,1104	81,19%	83,08%
13	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	98,77%	96,33%	97,29%
14	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	74,12%	76,08%	76,70%

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

15	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota	78,47%	81,19%	83,08%
16	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	76,25%	76,25	76,25
17	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Surat Keterangan	Surat Keterangan	Surat Keterangan
18	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)	98,77%	96,33%	97,29%
19	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	74,12%	76,08%	76,70%
20	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota (%)	100%	100%	100%
21	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	69,57%	72,66%	73,36%
22	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (%)	85%	42,86%	100%
23	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi (%)	99,38%	100%	100%

Sumber data : Renstra DPUPR Tahun 2025-2026

3.3. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

- a. Faktor-Faktor Pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan.

Untuk mewujudkan visi dan misi kota Tarakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan lebih fokus pada misi ke – 2 (dua) yaitu “Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur publik yang cepat, mudah, murah, adil dan

trasparan“ dan misi ke – 5 (lima) “Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, kreativitas dan inovatif berdasarkan ilmu pengetahuan“ yaitu melaksanakan tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan, rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 menggunakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan :

1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan berjumlah 3 yaitu :

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan berjumlah 2 yaitu :

1. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan berjumlah 1 yaitu :

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan berjumlah 5 Yaitu :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Fasilitas Kunjungan Tamu
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan berjumlah 5 yaitu :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pengadaan Alat Besar
3. Pengadaan Mebel
4. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

Sub Kegiatan berjumlah 2 yaitu :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

7) Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan berjumlah 5 yaitu :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
2. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Pengelolaan Sumber daya Air (SDA)

Kegiatan :

- 1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan berjumlah 4 yaitu :

1. Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
2. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai
3. Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
4. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya

- 2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasannya Dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan berjumlah 1 yaitu :

1. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa

3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Kegiatan :

1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan berjumlah 3 yaitu :

1. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan
2. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
3. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan

4. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Kegiatan :

1) Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan berjumlah 2 yaitu :

1. Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
2. Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Kegiatan :

1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan berjumlah 3 yaitu :

1. Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
2. Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
3. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.

Kegiatan :

- 1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan berjumlah 4 yaitu :

1. Optimalisasi Sistem Drainase Lingkungan
2. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
3. Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
4. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan

7. Program Penataan Bangunan Gedung.

Kegiatan :

- 1) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat Laik Fungsi Bangunan gedung

Sub Kegiatan berjumlah 3 yaitu :

1. Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
2. Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
3. Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG

8. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya.

Kegiatan :

- 1) Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan berjumlah 3 yaitu :

1. Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan
 2. Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
 3. Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
9. Program Penyelenggaraan Jalan.

Kegiatan :

- 1) Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan berjumlah 10 yaitu :

1. Pengelolaan Leger Jalan
 2. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
 3. Penggantian Jembatan
 4. Pembangunan Jalan
 5. Rekonstruksi Jalan
 6. Pemeliharaan Berkala Jalan
 7. Rehabilitasi Jembatan
 8. Pembangunan Jembatan
 9. Survey Kondisi Jalan/Jembatan
 10. Pemeliharaan Rutin Jalan
10. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Kegiatan :

- 1) Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

Sub Kegiatan berjumlah 4 yaitu :

1. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi kulaifikasi Jabatan Operator dan Teknis atau Analis
2. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi

3. Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
4. Penyediaan SOP Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
- 2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan berjumlah 3 yaitu :
 1. Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi
 2. Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kota
 3. Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi
- 3) Pengawasan tertib Usaha, tertib Penyelenggaraan dan tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
Sub Kegiatan berjumlah 2 yaitu :
 1. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
 2. Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
11. Program penyelenggaraan Penataan Ruang
Kegiatan :
 - 1) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan berjumlah 4 yaitu :
 1. Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota
 2. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
 - 2) Koordinasi dan sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

Sub Kegiatan berjumlah 2 yaitu :

1. Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
2. Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang
- 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan berjumlah 2 yaitu :

1. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
2. Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK.

Total kebutuhan/pagu indikatif yang direncanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 277.454.865.107,00. Rencana program dan kegiatan tersebut dituangkan dalam tabel berikut ini:

**TABEL 3.2 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TARAKAN
TAHUN 2025**

Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2025		2026			
			Target	Rp (dalam ribu rupiah)	Target	Rp (dalam ribu rupiah)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
				277.454.865		161.109.131		
Meningkatnya Pemenuhan Tata Kelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Nilai SAKIP	82,85/A	Nilai	14.980.456	82,85/A	Nilai	12.596.539
Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Nilai SAKIP	82,85/A	Nilai	14.980.456	82,85/A	Nilai	12.596.539
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Layanan Bagian Kesekretariatan	80	Nilai	14.980.456	80	Nilai	12.596.539
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	8	Laporan	9.000	3	Laporan	0
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	2.000	2	Laporan	
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	2.000	1	Laporan	
1.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	5.000		Dokumen	

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan sesuai SAP	12 Dokumen	11.023.896	12 Dokumen	10.889.925
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan	10.136.917	78 Orang/bulan	10.002.945
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	886.979	12 Dokumen	886.979
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rasio peningkatan kompetensi ASN	56,00 %	200.000	69,33 %	200.000
1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	200.000	20 Orang	200.000
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	255.123	100 %	247.195
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5.000	5 Paket	5.000
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	58 Paket	111.928	58 Paket	110.000
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	32.000	5 Paket	32.000
1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	6.000	0 Laporan	0
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	100.195	15 Laporan	100.195

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terinput dalam aplikasi SIMDA Barang dan E-MD	94 Unit	2.013.464	33 Unit	168.243
1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	264.222	0 Unit	0
	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	2 Unit	1.400.000	0 Unit	0
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13 Unit	64.286	13 Unit	64.286
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45 Unit	100.000	12 Unit	75.000
1.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	33 Unit	184.956	8 Unit	28.958
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase layanan jasa penunjang yang tersedia	100 %	202.000	100 %	202.000
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000	1 Laporan	2.000
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	200.000	12 Laporan	200.000

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	42,86 %	1.276.973	34,88 %	889.176
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	5.700	0 Unit	0
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	745.896	29 Unit	745.896
1.03.01.2.09.0003	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	75.000	12 Unit	100.000
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	407.097	Unit	0
1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	64 Unit	43.280	64 Unit	43.280

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Perkotaan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	84 Nilai			
Meningkatkan akses air minum layak bagi masyarakat		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan	96,33 %	5.300.000		5.900.000
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Volume tampungan air baku (meter3)	1.032.590 m3	18.675.000	1.160.590 m3	30.325.000
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Volume tampungan embung dan penampung lainnya dan Unit air baku	1.032.590 m3	18.275.000	1.160.590 m3	30.125.000
1.03.02.2.01.0114	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi			3 Unit	1.000.000
1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun			1 Dokumen	750.000
1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	0 Unit	17.875.000	1 Unit	28.375.000
1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	2 Dokumen	400.000	0 Dokumen	0

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan	2 Dokumen	400.000	1 Dokumen	200.000
1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	2 Dokumen	400.000	1 Dokumen	200.000
1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum	96,33 %	5.300.000	97,29 %	5.900.000
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan layanan pemasangan jaringan distribusi Air Minum	96,33 %	5.300.000	97,29 %	5.900.000
1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	1 Unit	500.000	3 Unit	1.000.000
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	2 Dokumen	300.000	1 Dokumen	400.000
1.03.03.2.01.0032	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1000 SR	4.500.000	1000 SR	4.500.000

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan		Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPA yang terbangun	40 %	2.500.000	100 %	2.500.000
1.03.04	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPA	40 %	2.500.000	100 %	2.500.000
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun	2 Unit	2.500.000	3 Unit	2.500.000
1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	152,42 Ton/hari	2.300.000	152,42 Ton/hari	2.300.000
1.03.04.2.01.0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	1 Unit	200.000	1 Unit	200.000
Meningkatnya akses sanitasi layak bagi masyarakat		Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi	76,08 %	3.100.000	76,70 %	3.000.000
1.03.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	76,08 %	3.100.000	76,70 %	3.000.000
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	60855 Rumah Tangga	3.100.000	61355 Rumah Tangga	3.000.000
1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	50 Rumah Tangga	0	50 Rumah Tangga	0

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	500 Rumah Tangga	3.000.000	500 Rumah Tangga	3.000.000
1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	100.000	0 Dokumen	0
Meningkatnya pengendalian banjir		Persentase luas genangan banjir	81,19 %	70.423.928	83,08 %	21.250.000
1.03.06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	60,38 %	70.423.928	65,38 %	21.250.000
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Luas Genangan Yang Tertangani (Ha)	2,56 Ha	70.423.928	2,40 Ha	21.250.000
1.03.06.2.01.0020	Optimalisasi Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	8385 m	16.770.000	3000 m	5.500.000
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	4 Sistem Drainase Perkotaan	40.903.928	4 Sistem Drainase Perkotaan	12.000.000
1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	24 Sistem Drainase Perkotaan	12.000.000	24 Sistem Drainase Perkotaan	3.500.000
1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	2 Dokumen	750.000	1 Dokumen	250.000

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya bangunan gedung yang memenuhi standar teknis		Persentase Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung yang memenuhi standar teknis	57,89 %	48.970.000	100,00 %	21.020.000
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Peresentase Bangunan Gedung yang terbangun dan terpelihara	57,89 %	48.970.000	100,00 %	21.020.000
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung dan Fasilitas Umum yang Terbangun dan Terpelihara	11 Bangunan Gedung	48.970.000	8 Bangunan Gedung	21.020.000
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	4 Bangunan Gedung	800.000	4 Bangunan Gedung	800.000
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	7 Dokumen	47.500.000	4 Dokumen	20.000.000
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	500 Dokumen	670.000	500 Dokumen	220.000

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya bangunan gedung yang memenuhi standar teknis		Persentase Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata	15,63% %	7.873.450	100,00% %	15.873.450
1.03.09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase bangunan dan lingkungan yang tertata sesuai dengan rencana tata bangunan dan lingkungannya	15,63% %	7.873.450	100,00% %	15.873.450
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	15,63% %	7.873.450	100,00% %	15.873.450
1.03.09.2.01.0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	150 Dokumen	173.450	150 Dokumen	173.450
1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	1 Kawasan	5.100.000	7 Kawasan	15.500.000
1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	7 Dokumen	2.600.000	2 Dokumen	200.000

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kondisi jalan mantap		Persentase panjang jalan dengan kondisi mantap	62,77% %	102.782.032	73,36% %	45.844.142
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan	62,77% %	102.782.032	73,36 %	45.844.142
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Yang Terbangun	243,38 km	102.782.032	243,56 km	45.844.142
1.03.10.2.01		Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap	145,97 km		170,604 km	
1.03.10.2.01		Jumlah Jembatan Yang Terbangun	89 jembatan		91 jembatan	
1.03.10.2.01		Jumlah Jembatan Dengan Kondisi Mantap	59 jembatan		63 jembatan	
1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan	Terkelolanya Leger Jalan	1 Dokumen	400.000	0 Dokumen	0
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				
1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	Jembatan	0	1 Jembatan	2.600.000
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	2,23 Km	8.653.395	1,17 Km	7.000.000
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	5,95 Km	73.303.841	5,11 Km	15.339.142
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	3,31 Km	10.254.796	6,13 Km	12.250.000

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	0 Jembatan	0	1 Jembatan	200.000
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	1 Jembatan	7.500.000	2 Jembatan	5.105.000
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	232,558 Km	270.000	232,558 Km	350.000
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1,00 Km	2.400.000	1,50 Km	3.000.000
Meningkatnya kualitas jasa konstruksi		Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	42,86% %	700.000	100,00% %	800.000
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100% %	700.000	100% %	800.000
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga jasa konstruksi yang terlatih yang tersertifikasi	90 Orang	450.000	120 Orang	500.000
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi kulaifikasi Jabatan Operator dan Teknis atau Analis	Jumlah tenaga jasa konstruksi kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi yang difasilitasi sertifikasi	90 Orang	200.000	120 Orang	300.000
1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	130 Lembaga	150.000	30 Lembaga	50.000

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.03.11.2.01.0012	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	5 Orang	50.000	5 Orang	50.000
1.03.11.2.01.0015	Penyediaan SOP Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	1 Dokumen	50.000	0 Dokumen	0
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	0 Orang	0	50 Orang	100.000
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1 Dokumen	150.000	1 Dokumen	200.000
1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah perangkat pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1 Perangkat	50.000	1 Perangkat	50.000
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kota	1 Dokumen	50.000	1 Dokumen	100.000
1.03.11.2.02.0014	Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Terselenggaranya pelatihan untuk peningkatan kapasitas administrasi SIPJAKI	0 Orang	0	0 Orang	0
1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang dioperasikan	1 Layanan Informasi	50.000	50 Layanan Informasi	50.000

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Pengawasan Pemanfaatan produk jasa konstruksi yang terlaksana	30 Produk Jakon	100.000	30 Produk Jakon	100.000
1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah paket pekerjaan Jasa Konstruksi kota yang diawasi dan dievaluasi tertib penyelenggaraan	30 Paket Pekerjaan	50.000	30 Paket Pekerjaan	50.000
1.03.11.2.02.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi kota yang diawasi dan dievaluasi tertib penyelenggaraan				
1.03.11.2.02.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi kota yang diawasi dan dievaluasi tertib penyelenggaraan	0	0	0	0
1.03.11.2.02.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi kota yang diawasi dan dievaluasi tertib penyelenggaraan	0	0	0	0
1.03.11.2.02.0008	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 Dokumen	50.000	1 Dokumen	50.000
Meningkatnya pembangunan yang sesuai tata ruang		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	98,35 %	2.150.000	98,50 %	2.000.000
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kepatuhan Pelaksanaan KKPR	25 %	2.150.000	50 %	2.000.000

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RTRW dan RDTR yang Ditetapkan	1 Dokumen	1.350.000	3 Dokumen	1.350.000
1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	2 Dokumen	450.000	1 Dokumen	700.000
1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	350.000	1 Dokumen	450.000
1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	400.000	0 Dokumen	0
1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	2 Laporan	150.000	2 Laporan	200.000
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rakor Yang Dilaksanakan	3 Dokumen	450.000	3 Dokumen	300.000
1.03.12.2.03.0005	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	3 Dokumen	200.000	3 Dokumen	200.000
1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	250.000	1 Sistem Informasi	100.000

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang	85 %	350.000	85 %	350.000
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	3 Dokumen	100.000	3 Dokumen	100.000
1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	250.000	1 Dokumen	250.000

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

4.1. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2025 diarah untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perubahan Tahun 2025-2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Untuk tahun 2025 akan dilaksanakan program-program kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Dengan melakukan pembebasan lahan untuk tempat penampungan air baku serta membuat *feasibility study* (FS) *intake*, *long storage* dan jaringan irigasi kota Tarakan.

2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Dengan melakukan pemasangan jaringan distribusi air minum untuk pengembangan pengelolaan sistem penyediaan air minum.

3. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional

Dengan melakukan pengembangan sistem dan pengelolaan sistem persampahan dengan membangun TPA dan TPS3R.

4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Dengan mengelola dan mengembangkan sistem air limbah domestik untuk masyarakat kota Tarakan.
5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
Dengan melakukan Pembangunan dan pemeliharaan terhadap sistem drainase lingkungan dan perkotaan.
6. Program Penataan Bangunan Gedung
Dengan melakukan Pembangunan serta pemeliharaan terhadap bangunan Gedung pemerintah dan fasilitas umum.
7. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
Dengan melakukan penataan terhadap bangunan beserta lingkungannya
8. Program Penyelenggaraan Jalan
Dengan melakukan pengelolaan leger jalan, melakukan Pembangunan, pemeliharaan dan rekonstruksi jalan serta jembatan.
9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Dengan menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil konstruksi, menyiapkan sistem informasi jasa konstruksi dan melakukan pengawasan terhadap tertib usaha, penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi.
10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Dengan melakukan pendampingan pelaksanaan persetujuan substansi RDTR, melaksanakan rapat koordinasi dan menyelesaikan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang.

4.2. Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan DPUPR adalah Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Perkotaan dengan pagu total Rp 277,454,865,107.00. Untuk Sasaran DPUPR yang menjawab Indikator Kinerja Utama, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Meningkatkan Tata Kelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan indikator Nilai SAKIP dengan target 82,85. Persentase

Pengawasan dan Pengendalian Mutu Pelaksanaan Kegiatan Lab Uji Bahan Konstruksi Sesuai Standar SNI dengan target 100%. Indikator tersebut diampu oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp14,980,456,000.00.

- Meningkatnya Pelayanan Air Bersih, dengan indikator Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Air Minum yang memiliki target sebesar 96.33 %. Indikator tersebut diampu oleh dua program, yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan pagu anggaran Rp 18,675,000,000.00 dan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan pagu anggaran Rp 5,300,000,000.00.
- Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan, dengan indikator Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun yang memiliki target 40%. Indikator tersebut diampu oleh Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional dengan pagu anggaran sebesar Rp 2,500,000,000.00.
- Meningkatnya Pengendalian Banjir, dengan indikator Persentase Luas Genangan Banjir yang memiliki target 81,19%. Indikator tersebut diampu oleh Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase dengan pagu anggaran sebesar Rp 70,423,927,567.00.
- Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkotaan, dengan beberapa indikator sebagai berikut:
 1. Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik yang memiliki target 76.08%. Indikator tersebut diampu oleh Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan pagu anggaran sebesar Rp 3,100,000,000.00.
 2. Persentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum yang memiliki target 57,89%. Indikator ini diampu oleh Program Penataan Bangunan Gedung dengan pagu anggaran sebesar Rp 48,970,000,000.00.

3. Persentase Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata yang memiliki target 15,63%. Indikator ini diampu oleh Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dengan pagu anggaran sebesar Rp7,873,450,000.00.
4. Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap yang memiliki target 62.77%. Indikator ini diampu oleh Program Penyelenggaraan Jalan dengan pagu anggaran sebesar Rp 102,782,031,540.00.
5. Persentase pembinaan jasa konstruksi yang memiliki target 100%. Indikator ini diampu oleh Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan pagu anggaran sebesar Rp 700,000,000.00.
6. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang memiliki target 98.35%. Indikator tersebut diampu oleh Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan pagu anggaran sebesar Rp 2,150,000,000.00.

Adapun rincian Program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaannya tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2025

Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2025	
			Target	Rp (dalam ribu rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				277.454.865
	Meningkatnya Pemenuhan Tata Kelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai SAKIP	82,85/A	Nilai
	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai SAKIP	82,85/A	Nilai
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Layanan Bagian Kesekretariatan	80	Nilai
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	8	Laporan
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan
1.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan sesuai SAP	12	Dokumen
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78	Orang/bulan
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rasio peningkatan kompetensi ASN	56,00	%
1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	Orang
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100	%

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5.000
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	58 Paket	111.928
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	32.000
1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	6.000
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	100.195
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terinput dalam aplikasi SIMDA Barang dan E-MD	94 Unit	2.013.464
1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	264.222
	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	2 Unit	1.400.000
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13 Unit	64.286
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45 Unit	100.000
1.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	33 Unit	184.956
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase layanan jasa penunjang yang tersedia	100 %	202.000
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	200.000

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	42,86 %	1.276.973
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	5.700
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	745.896
1.03.01.2.09.0003	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	75.000
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	407.097
1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	64 Unit	43.280
Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Perkotaan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	84 Nilai	
Meningkatkan akses air minum layak bagi masyarakat		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan	96,33 %	5.300.000
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Volume tampungan air baku (meter3)	1.032.590 m3	18.675.000
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Volume tampungan embung dan penampung lainnya dan Unit air baku	1.032.590 m3	18.275.000
1.03.02.2.01.0114	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi		

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun		
1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	0 Unit	17.875.000
1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	2 Dokumen	400.000
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan	2 Dokumen	400.000
1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	2 Dokumen	400.000
1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum	96,33 %	5.300.000
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan layanan pemasangan jaringan distribusi Air Minum	96,33 %	5.300.000
1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	1 Unit	500.000
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	2 Dokumen	300.000
1.03.03.2.01.0032	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1000 SR	4.500.000

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan		Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPA yang terbangun	40 %	2.500.000
1.03.04	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPA	40 %	2.500.000
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun	2 Unit	2.500.000
1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	152,42 Ton/hari	2.300.000
1.03.04.2.01.0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	1 Unit	200.000
Meningkatnya akses sanitasi layak bagi masyarakat		Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi	76,08 %	3.100.000
1.03.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	76,08 %	3.100.000
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	60855 Rumah Tangga	3.100.000
1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	50 Rumah Tangga	0
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	500 Rumah Tangga	3.000.000
1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	100.000
Meningkatnya pengendalian banjir		Persentase luas genangan banjir	81,19 %	70.423.928
1.03.06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	60,38 %	70.423.928
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Luas Genangan Yang Tertangani (Ha)	2,56 Ha	70.423.928

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.03.06.2.01.0020	Optimalisasi Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	8385 m	16.770.000
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	4 Sistem Drainase Perkotaan	40.903.928
1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	24 Sistem Drainase Perkotaan	12.000.000
1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	2 Dokumen	750.000
Meningkatnya bangunan gedung yang memenuhi standar teknis		Persentase Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung yang memenuhi standar teknis	57,89 %	48.970.000
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Peresentase Bangunan Gedung yang terbangun dan terpelihara	57,89 %	48.970.000
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung dan Fasilitas Umum yang Terbangun dan Terpelihara	11 Bangunan Gedung	48.970.000
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	4 Bangunan Gedung	800.000
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	7 Dokumen	47.500.000
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	500 Dokumen	670.000

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya bangunan gedung yang memenuhi standar teknis		Persentase Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata	15,63% %	7.873.450
1.03.09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase bangunan dan lingkungan yang tertata sesuai dengan rencana tata bangunan dan lingkungannya	15,63% %	7.873.450
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	15,63% %	7.873.450
1.03.09.2.01.0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	150 Dokumen	173.450
1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	1 Kawasan	5.100.000
1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	7 Dokumen	2.600.000
Meningkatnya kondisi jalan mantap		Persentase panjang jalan dengan kondisi mantap	62,77% %	102.782.032
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan	62,77% %	102.782.032
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Yang Terbangun	243,38 km	102.782.032
1.03.10.2.01		Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap	145,97 km	
1.03.10.2.01		Jumlah Jembatan Yang Terbangun	89 jembatan	
1.03.10.2.01		Jumlah Jembatan Dengan Kondisi Mantap	59 jembatan	
1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan	Terkelolanya Leger Jalan	1 Dokumen	400.000
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun		

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	Jembatan	0
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	2,23 Km	8.653.395
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	5,95 Km	73.303.841
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	3,31 Km	10.254.796
1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	0 Jembatan	0
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	1 Jembatan	7.500.000
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	232,558 Km	270.000
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1,00 Km	2.400.000
Meningkatnya kualitas jasa konstruksi		Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	42,86% %	700.000
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100% %	700.000
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga jasa konstruksi yang terlatih yang tersertifikasi	90 Orang	450.000
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi Jabatan Operator dan Teknis atau Analis	Jumlah tenaga jasa konstruksi kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi yang difasilitasi sertifikasi	90 Orang	200.000
1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	130 Lembaga	150.000
1.03.11.2.01.0012	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	5 Orang	50.000

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.03.11.2.01.0015	Penyediaan SOP Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	1 Dokumen	50.000
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	0 Orang	0
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1 Dokumen	150.000
1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah perangkat pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1 Perangkat	50.000
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kota	1 Dokumen	50.000
1.03.11.2.02.0014	Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Terselenggaranya pelatihan untuk peningkatan kapasitas administrasi SIPJAKI	0 Orang	0
1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang dioperasikan	1 Layanan Informasi	50.000
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Pengawasan Pemanfaatan produk jasa konstruksi yang terlaksana	30 Produk Jakon	100.000
1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah paket pekerjaan Jasa Konstruksi kota yang diawasi dan dievaluasi tertib penyelenggaraan	30 Paket Pekerjaan	50.000
1.03.11.2.02.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi kota yang diawasi dan dievaluasi tertib penyelenggaraan		
1.03.11.2.02.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi kota yang diawasi dan dievaluasi tertib penyelenggaraan	0	0
1.03.11.2.02.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi kota yang diawasi dan dievaluasi tertib penyelenggaraan	0	0

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.03.11.2.02.0008	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 Dokumen	50.000
Meningkatnya pembangunan yang sesuai tata ruang		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	98,35 %	2.150.000
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kepatuhan Pelaksanaan KKPR	25 %	2.150.000
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RTRW dan RDTR yang Ditetapkan	1 Dokumen	1.350.000
1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	2 Dokumen	450.000
1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	350.000
1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	400.000
1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	2 Laporan	150.000
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rakor Yang Dilaksanakan	3 Dokumen	450.000
1.03.12.2.03.0005	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	3 Dokumen	200.000
1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	250.000
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang	85 %	350.000
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	3 Dokumen	100.000
1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	250.000

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tarakan Tahun 2025 serta Rencana Strategis Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2025-2026. RKPD Tahun 2025 disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2026 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tarakan Tahun 2005-2025, sehingga terdapat keselarasan antar dokumen perencanaan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah.

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2025 ini menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta acuan dalam bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sasaran dan target pembangunan yang diamanatkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan. Penyusunan Renja didasarkan pada program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra serta memperhatikan skala prioritas yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Tarakan, _____ Juli 2024
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang



FANDARIANSYAH, S.T., M.T.
NIP. 19710508 199803 1 009